

# PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Yustika Rezkiyanti\*)

Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

E-mail : yustikayanti.yr@gmail.com

## Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa. Masalah yang timbul terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan kompetensi Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan kompetensi Perangkat Desa di Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan Desa, dan Badan Pengawasan Desa sejumlah 128 responden. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikansi  $0,018 > 0,05$ , 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$ , 3) Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$ .

**Kata Kunci:** Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Perangkat Desa.

## Abstract

The accountability of village fund management has become a demand for local government. Problems emerging from the accountability of village fund management are related to the **internal control system**, Utilization of Information Technology and the competence of village officials. This research aims to know and analyze the influence of the **internal control system**, Utilization of Information Technology and the competence of village officials to accountability of village fund management in Takalar Regency. This is a quantitative research study and data were collected by questionnaires. Population and sample are village fund management officers in Takalar Regency with 128 respondents. The hypothesis was tested by multiple linear regression analysis with SPSS application. The findings show that: (1) The Internal Control System has a positive and significant impact on the accountability of village fund management with the significant value  $0,018 > 0,05$ , (2) Utilization of Information Technology has a positive and significant impact on the accountability of village fund management with the significant value,  $0,000 > 0,05$  and (3) The competence of village officials has a positive and significant impact on the accountability of village fund management with the significant value  $0,000 > 0,05$ .

**Keywords:** Internal Control System, Utilization of Information Technology, Competence of village officials.

## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN

untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa

Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikan

penyaluran dana desa kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat fenomena yang muncul mengenai dana desa. Pertama peningkatan anggaran dana desa dari tahun 2016 dan 2017 akan menyebabkan terjadinya penyimpangan aliran dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berdasarkan (Robert Klitgaard 2001) yang menjelaskan bahwa monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi.

Beberapa pemberitaan media yang membahas kasus korupsi yang menjerat kepala desa, maka tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Hasil evaluasi penggunaan dana desa semester satu tahun 2016 masih mengalami permasalahan, seperti : penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, dan pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai (Kementerian Keuangan RI, 2016:19).

Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana desa melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran berkenaan, belum tertibnya administrasi keuangan, meningkatnya temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan anggaran (Mada, dk 2017). Dengan demikian penulis menduga bahwa permasalahan

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kab. Takalar diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan kompetensi Perangkat desa.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kab. Takalar ?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kab. Takalar ?
3. Apakah Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kab. Takalar ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kab. Takalar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kab. Takalar.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kab. Takalar.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Stewardship Theory***

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996 dalam Zoelisty dan Adityawarman, 2014: 16) dan non profit lainnya (Vargas, 2014 dalam Zoelisty dan Adityawarman, 2014: 16) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Teori ini menjadi landasan dari penelitian ini yang dapat menjelaskan bahwa Masyarakat Desa sebagai *principal* yang mempercayakan pemerintah Desa sebagai *steward* untuk mengelola dana desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan desa.

#### **Akuntabilitas**

Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang berarti “Yang dapat dipertanggungjawabkan” dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Namun, kata *responsibility* juga dapat diartikan sebagai “Tanggung jawab”, maka menurut Muslimin, dkk (2012) Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama, namun memiliki makna yang berbeda. Dalam hal birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut (Muslimin, dkk. 2012).

Secara Filosofis, akuntabilitas timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada (Muslimin, dkk. 2012).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah

tidak dapat diketahui tanpa adanya informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya beserta penggunaannya. Maka dari itu, sebagai wujud akuntabilitas atas pengelolaan keuangan, kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada kepala daerah Tk. II. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Arifiyanto, 2014).

#### **Sistem Pengendalian Internal**

Pemerintah Pusat telah berupaya membangun sistem pengendalian internnya melalui penerbitan beberapa ketentuan, seperti Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Misalnya, untuk mencegah adanya program dan kegiatan pada RPJMDes dan RKP Des serta APB Des yang tidak sesuai aspirasi masyarakat, telah ditetapkan adanya mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Kegiatan itu harus diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa. Selain itu masing-masing Pemerintah Kabupaten menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa sesuai keadaan daerahnya.

Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP terdiri atas:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Internal

#### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dengan adanya dana desa maka pemerintah desa berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Di era globalisasi, laporan pertanggungjawaban dibuat secara komputerisasi, bukan lagi secara manual. Dengan memanfaatkan komputer.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah telah diatur dalam PP No. 56 Tahun

2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Teknologi Informasi yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan sebuah akses dengan biaya yang terjangkau, dan tanggap terhadap kebutuhan manusia (Razi, 2017). Pada dasarnya, Teknologi Informasi tersebut dapat mempercepat pembangunan nasional menjadi lebih demokratis, berkelanjutan, dan memfasilitasi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera. Sasaran sebenarnya adalah bagaimana agar lebih banyak orang yang dapat memanfaatkan teknologi informasi, sehingga Teknologi Informasi dapat mendorong terjadinya transformasi sosial dan ekonomi (Halim, 2008). Suatu organisasi sekarang sudah banyak yang menjadikan Teknologi Informasi sebagai pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi yang kuat dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat saat ini.

### Pemerintah Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Perangkat desa merupakan suatu unsur pembantu kepala desa. Struktur Pemerintah Desa dapat dilihat pada gambar berikut:



### Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dialokasikan dalam bentuk transfer. Seluruh anggaran Dana Desa wajib disalurkan kepada desa tanpa dikurangi sedikitpun. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota berperan sebagai tempat penyimpanan sementara dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa.

Proses pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya aspek tata pemerintahan yang baik, dan yang menjadi salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

### Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (*Quantitative Approach*) dengan *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan pengukuran jawaban kuesioner menggunakan skala Likert.

### Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini yaitu 5 Kecamatan di kabupaten takalar yang berisi 33 desa. jumlah populasi dalam penelitian ini terbatas sehingga seluruh populasi menjadi bagian dari sampel. Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan Desa, dan Badan Pengawasan Desa.

### Metode Analisis

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak *SPSS for windows*.

### Uji Instrumen Penelitian

#### Uji Validitas

Suatu instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi  $r$  hitung lebih besar dibandingkan koefisien korelasi  $r$  tabel pada taraf signifikansi 5%. Pada penelitian ini, nilai  $r$  tabel 0,146 sedangkan nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka

dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dikatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Pada uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik (Sugiyono, 2002). Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik.

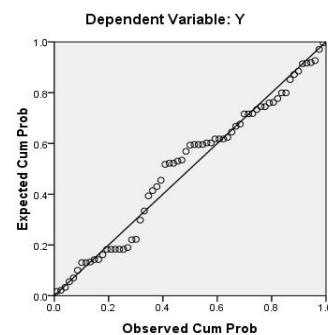
Var.	Cronbach's Alpha
(X <sub>1</sub> )	0,697
(X <sub>2</sub> )	0,747
(X <sub>3</sub> )	0,651
(Y)	0,818

Nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan (X<sub>1</sub>), (X<sub>2</sub>), (X<sub>3</sub>), dan (Y) dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Pada gambar di atas, grafik normal plot memperlihatkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

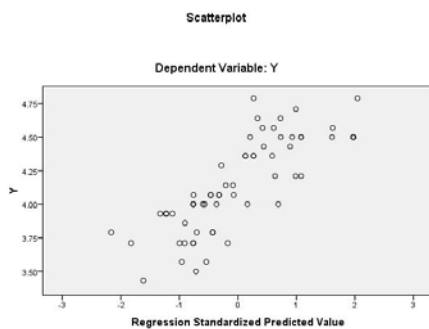
## Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
skorsp	.830	1.205
skorT	.775	1.291
skorK	.731	1.369

a. Dependent Variable: SKORY

Berdasarkan tabel di atas, nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

## Heteroskedastisitas



Pada garis scatterplot yang ada dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

## Autokorelasi

Metode pengujian dengan membandingkan nilai durbin watson output SPSS dan nilai tabel durbin watson.

$$dw > du = 1,910 > 1,776$$

$$(4 - dw) > du = (4 - 1,910) > 1,776$$

$$\text{Atau } dw > du < (4 - dw) = 1,910 > 1,776 < (2,09)$$

dw terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi.

## PENGUJIAN HIPOTESIS Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	6.772	4.442
	skorsp	.225	.094
	skorT	.454	.112
	skorK	.732	.166

a. Dependent Variable: SKORY

Berdasarkan hasil di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6,772 + 0,225 X1 + 0,454 X2 + 0,732 X3$$

Ket :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan DD

X1 = SPI

X2 = Pemanfaatan TI

X3 = Kompetensi Perangkat Desa

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677 <sup>a</sup>	.459	.446	2.609

a. Predictors: (Constant), skorK, skorsp, skorT

Nilai R 0,677 menandakan adanya hubungan kuat antara Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, karena berada pada interval 0,600-0,799.

R Square sebesar 0,459 menandakan 45,9% Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat Desa, sisanya 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	F	Sig.
1 Regression	715.589	35.033	.000 <sup>a</sup>
Residual	844.286		
Total	1559.875		

Hasil uji F dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 35,033 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,70. Karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka hipotesis diterima. Selain itu, nilai signifikansi F diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya secara simultan Variabel Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan teknologi Informasi dan Kompetensi Perangkat Desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Beberapa Desa Kab. Takalar.

### Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	6.772	4.442	1.524	.130
skorsp	.225	.094	2.400	.018
skorT	.454	.112	4.051	.000
skorK	.732	.166	4.408	.000

1. Nilai signifikan ( $X_1$ )  $0,018 < 0,05$  (taraf kesalahan) maka hipotesis pertama diterima terdapat pengaruh signifikan antara Sistem Pengendalian internal terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Nilai sig. variabel Pemanfaatan teknologi Informasi ( $X_2$ )  $0,000 > 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis kedua diterima terdapat pengaruh signifikan antara Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3. Nilai sig. variabel Kompetensi perangkat desa ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) sebesar  $0,000 > 0,05$ . Maka hipotesis Ketiga diterima terdapat pengaruh signifikan antara Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

### KESIMPULAN

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3. Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

### SARAN

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar agar lebih memerhatikan pengelolaan dana desa di kabupaten takalar
2. Jika penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa mungkin dapat menambahkan faktor analisis yang lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.
3. Saat melakukan penelitian lapangan diharapkan selalu mencatat nomor telepon/ kontak yang dapat dihubungi. Sehingga peneliti selalu melakukan *reminder* atau mengingatkan kepada pihak desa agar saat kuisioner telah disebar dan akan diambil kembali, kuisioner tersebut dalam keadaan telah siap untuk diambil dan peneliti tidak perlu menunggu jikalau masih ada kuisioner yang belum terisi.

4. Alangkah lebih baik jika ingin melakukan penelitian ke desa-desa untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan, sehingga pihak kecamatan dapat membantu mengumpulkan para aparatur desa di satu tempat. Hal tersebut dapat meminimalisir terbuangnya waktu untuk mencari alamat desa yang jauh dan sulit untuk diakses.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mada, Sarifudin., Lintje Kalangi., dan Hendrik Gamaliel. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Zoelisty, Capridiea, dan Adityawarman. 2014. *Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Di Lingkungan Universitas Diponegoro)*. Diponegoro Journal Of Accounting Vo
- Muslimin., Mappamiring., dan St. Nurmaeta., 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Vol. II No. 1.
- Arifiyanto., Dwi Febri., dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kab. Jember*. Jurnal riset akuntansi dan keuangan, 2 (3), 2014.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Razi, Riska Fahrul. 2017. *Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. JOM Fekon Vol. 4 No. 1.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.